

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 26 November - 5 Desember 2016

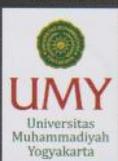
# INSIDE

## MGPS EDITION

PEACE AND INTER-RELIGIOUS DIALOGUE  
IN WORLDWIDE EDUCATION



MAHATHIR  
GLOBAL  
PEACE  
SCHOOL  
#5



[www.mgps.umy.ac.id](http://www.mgps.umy.ac.id)



# SALAM PEMBUKA

Menjadi institusi pendidikan besar di Indonesia memberikan tanggung jawab luar biasa bagi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Maka tidak hanya sekedar menciptakan generasi muda yang berkemajuan dan berakhlak mulia, UMY juga harus berkontribusi lebih kepada negara maupun pada level mancanegara. Hal itu dibuktikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang selalu berupaya setiap saat ikut serta dalam kegiatan berkualitas, baik secara nasional maupun internasional.

Salah satu kegiatan tersebut tercermin dengan pelaksanaan Mahathir Global Peace School (MGPS) yang rutin dilaksanakan sejak tahun 2013. Program ini memiliki tujuan untuk membangun pemikiran menciptakan perdamaian dunia. Hingga tahun 2016, MGPS telah dilaksanakan sebanyak lima kali dan selalu diikuti oleh puluhan partisipan dari berbagai negara. Mereka tak hanya menjadi peserta program demi mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru, namun juga menjadi agen perdamaian untuk negara mereka masing-masing. Kegiatan ini didukung penuh oleh UMY karena menyadari sebagai kampus Unggul dan Islami, maka UMY harus menampilkan wajah Islam yang sesungguhnya, yakni Islam *rahmatan 'lil alamin*, Islam yang menjadi rahmat bagi semua, Islam yang cinta perdamaian.

Banyak pemikiran-pemikiran positif, inovatif dan solutif terkait permasalahan perdamaian dunia saat pelaksanaan MGPS 1, MGPS 2, MGPS 3 hingga MGPS 4, sehingga sayang jika pemikiran-pemikiran tersebut tidak terdokumentasikan untuk disebarkan kembali kepada khalayak agar menciptakan kesada-

ran untuk mewujudkan perdamaian dunia. Maka Inside kali ini adalah rangkuman pemikiran tersebut yang disajikan dalam bentuk jurnalistik agar bisa dinikmati kapanpun. Kami merangkum mulai dari ide pelaksanaan MGPS sebagai sekolah perdamaian karena menyadari bahwa perang bukanlah solusi atas permasalahan yang terjadi. Kami juga menyajikan pemikiran para narasumber dalam pelaksanaan MGPS seperti Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, yang menyatakan bahwa untuk menyelesaikan konflik maka harus dikembangkan relasi antar bangsa bukan melalui perang; pemikiran mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. Dino Patti Djalal yang menyampaikan pentingnya memperhatikan local wisdom untuk penyelesaian konflik; hingga pemikiran mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Buya Syafi'i Maarif yang mencermati banyaknya kemunculan manusia-manusia konsumtif, serta pemikiran dan ide lainnya yang tentu memiliki peranan dalam mewujudkan kedamaian di muka bumi.

Persembahkan Inside edisi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, komitmen dan kerja keras banyak pihak. Terima kasih untuk pimpinan UMY yang memberikan dukungan material serta rekan-rekan di Biro Humas dan Protokol yang rela lembur dan memenuhi deadline sehingga newsletter ini bisa dinikmati. Semoga sajian ini bermanfaat dan menjadi monumen bagi perjalanan sejarah UMY menuju universitas kelas dunia. Insha Allah...

Oleh Kepala Biro Humas dan Protokol UMY Ratih Herningtyas

Penanggung Jawab  
Sri Atmaja P. Rosyidi

Kepala Biro Humas dan Protokol  
Ratih Herningtyas

Pimpinan Redaksi  
Frizki Nurnisya

Reporter  
Sakinatudh Duhuriyah  
Lalu Fahmy A, Annisa Magianti  
Asri Utami, Ahlul Amasyah  
Shidqi Noer Salsa, M Abdul Qadar  
Nurul Hunafa, Hevi Aida Mirfanda  
Deansa Sonia H, Bagus Reza M

Layouter  
Nashwan Ihsan F

Dipublikasikan Oleh  
Biro Humas dan Protokol UMY

Jl. Ringroad Barat, Kasihan, Bantul  
Yogyakarta

## Rektor UMY : Perbedaan Agama Harus Bawa Perdamaian



Rektor UMY Dr. Bambang Cipto, M.A

Keberagaman agama di dunia seringkali memunculkan pemikiran dan pandangan hidup yang berbeda. Sehingga keberagaman agama tersebut beresiko untuk menimbulkan konflik antar umat. Meski demikian, ajaran dalam setiap agama selalu menjunjung tinggi perdamaian. Oleh karenanya, perbedaan agama seharusnya tidak menghalangi terwujudnya perdamaian di dunia.

Dengan mengangkat tema "Peace and Inter-Religious Dialogue in Worldwide Education," Mahathir Global Peace School (MGPS) ke-5 diharapkan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Prof. Bambang Cipto, M.A., dapat menjadi ajang pemersatu umat beragama di dunia. Beliau juga berharap MGPS 5 akan menghasilkan orang-orang yang memahami betul bagaimana membina hubungan antar agama di dunia Internasional.

"Jadi memang hubungan antar agama merupakan satu hal yang penting. Dan itu bisa dimulai dengan proses pendidikan, yang mungkin bisa memberikan peluang bagi para pemeluk agama yang berbeda untuk saling menghargai dan menghormati. Sehingga terwujud masyarakat yang damai sebagaimana selalu menjadi tujuan dari MGPS selama ini, yakni menciptakan dunia yang semakin damai," terang Prof. Bambang.

Rektor UMY juga menyebutkan bahwa isu perbedaan agama sering menjadi sumber pertikaian, konflik dan bahkan peperangan. Oleh karenanya beliau menegaskan diperlukannya upaya-upaya akademik melalui pendidikan yang bisa

menghasilkan suatu visi dimana perdamaian itu dibutuhkan oleh seluruh agama.

"Hubungan antar agama itu bisa memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia. Oleh karena itu, MGPS penting diselenggarakan dengan harapan nanti berbagai pendapat dari kalangan agama bisa memberikan visi masing-masing yang intinya adalah menciptakan dunia yang penuh perdamaian berdasarkan masing-masing visi dari agama yang berbeda," tambah. Prof. Bambang.

Selain akan memberikan manfaat bagi para pesertanya, Rektor UMY berharap MGPS 5 juga akan membawa dampak baik pada masyarakat luas. Para peserta MGPS 5 diharapkan mampu menyebarkan nilai-nilai baik yang mereka dapatkan selama mengikuti program MGPS, untuk kemudian dapat mereka sampaikan kepada masyarakat negara asal mereka.

"Jadi memang ini persoalan yang sangat kompleks. Kita memang bisa mengharapkan mereka memiliki suatu pandangan yang bagus dan bermanfaat untuk pengembangan interaksi dengan berbagai agama yang berbeda. Tetapi masyarakat secara umum terkadang memiliki pendapat yang berbeda dan sangat terbatas pengetahuannya oleh karena itu saya kira tugas peserta untuk pulang sehingga bisa mensosialisasikan ilmu yang mereka dapat selama program MGPS kepada kelompok agama di negara masing-masing. Semoga kesadaran dan masyarakat luas akan bertambah dan bermanfaat sebagai kehidupan berbangsa," tutup Rektor UMY. (Deansa)



# MGPS, Bentuk Komitmen UMY dan PGPF Untuk **Perdamaian Dunia**

---



Perang adalah kriminal. Karena perang bukanlah sesuatu yang dibenarkan (dilegitimasi), dan merupakan tindakan yang melanggar hukum (*illegitimate*). Perang juga bukanlah solusi, atas segala bentuk konflik atau permasalahan yang terjadi. Perang juga dapat menghancurkan sebuah negara, karena banyak korban jiwa yang berjatuhan. Bahkan, mirisnya lagi banyak negara yang saat ini justru saling beradu dalam peperangan dan tidak peduli siapa yang menjadi korbannya. Masyarakat dunia semestinya juga mengetahui dan menyadari akan kerugian yang telah ditimbulkan dari peperangan tersebut. Selain karena peperangan saat ini yang semakin brutal, perang yang terjadi saat ini pun seolah-olah merupakan sebuah misi pembunuhan.

Itulah pola pikir yang sudah seharusnya diubah oleh masyarakat dunia tentang perang. Masyarakat dunia tak perlu lagi menyelesaikan segala bentuk konflik yang terjadi dengan jalan peperangan. Namun harus berupaya penuh untuk menyelesaikannya dengan jalan perdamaian. Hal ini karena pada dasarnya setiap orang itu pasti menginginkan perdamaian bukan peperangan. Dan perdamaian itulah satu-satunya solusi untuk menyelesaikan konflik atau pertikaian yang terjadi.

Hal itu pulalah yang terus digemakan oleh Perdana Global Peace Foundation (PGPF) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), sejak tiga tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 2013 dimana keduanya telah berkomitmen untuk menyuarkan perdamaian pada seluruh masyarakat dunia. Melalui program yang mereka ciptakan, yakni Mahathir Global Peace School (MGPS).

MGPS ini adalah program yang memiliki tujuan untuk membangun pemikiran yang sama dari partisipannya dalam menciptakan perdamaian di masing-masing negara. Sekolah perdamaian yang telah diselenggarakan sebanyak lima kali ini juga selalu diikuti oleh puluhan partisipan dari berbagai negara. Mereka tak hanya menjadi peserta program demi mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru, namun juga menjadi agen perdamaian untuk negara mereka masing-masing.

Ketua PGPF, Tan Sri Norian Mai mengungkapkan bahwa program MGPS tersebut merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membantu mewujudkan perdamaian di dunia. Melalui kegiatan itulah, masyarakat dunia diajak untuk peduli akan perdamaian dunia dan harus bertindak cepat untuk menciptakan perdamaian tersebut. "Kita harus bertindak cepat untuk menciptakan perdamaian. Banyak yang membahas tentang perdamaian, tapi masih sedikit yang membahas dan melihat bagaimana perdamaian dunia yang sebenarnya. Karena itulah, melalui MGPS ini kami berharap, ide-ide yang dihasilkan dari kegiatan ini dapat memberikan kontribusi nyata untuk perdamaian dunia," ungkapnya.

*"Banyak yang membahas tentang perdamaian tapi masih sedikit yang membahas dan melihat bagaimana perdamaian dunia yang sebenarnya"*

Sekolah perdamaian pertama di Indonesia dan Malaysia yang diinisiasi oleh PGPF dan UMY ini juga merupakan salah satu bentuk kepedulian dari para kalangan akademisi, mahasiswa serta pemerintah dari berbagai negara untuk perdamaian dunia. Kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk seminar dan pertemuan tingkat pakar ini pun merumuskan tiga hal dalam penyelenggaraannya. Pertama, penyamaan persepsi terkait perdamaian yang dilandasi dengan berlakunya nilai-nilai keadilan antar sesama manusia. Kedua, penyamaan persepsi tentang pentingnya menjaga perdamaian di muka bumi, dengan berlandaskan pada hak dan kewajiban manusia. Dan ketiga, mencari peluang perubahan konsep perdamaian dalam bentuk kurikulum pendidikan.

Nama kegiatan Mahathir Global Peace School ini memang secara spesifik mengambil nama salah seorang tokoh, yakni Tun Dr Mahathir Mohamad. Hal ini dikarenakan Tun Mahathir dikenal sebagai seorang aktivis non blok dan fokus kajiannya yang selalu mengangkat tentang ketidakadilan, kekerasan dan penindasan yang ada di muka bumi. Tak hanya itu, Tun Mahathir juga dikenal dengan rekonstruksi pemikirannya mengenai perdamaian dalam perspektif humanitas antar negara dan antar ras.

Pelaksanaan MGPS yang telah berjalan selama empat kali sejak 2013 juga memiliki titik penekanan yang sama, bahwa perang bukanlah solusi untuk mencapai perdamaian dunia. Sebagaimana poin penting yang disampaikan dalam MGPS pertama di UMY pada 3 hingga 15 Juni 2013. Dalam MGPS pertama tersebut disebutkan bahwa terjadinya perang tidak terlepas dari peran seorang pemimpin, khususnya pemimpin negara. Seorang pemimpin bisa jadi yang bertanggungjawab atas terjadinya perang, karena itulah sudah seharusnya rakyat di suatu negara tersebut untuk lebih memilih pemimpin yang cinta damai, bukan yang cinta peperangan.

Pada MGPS kedua yang diselenggarakan di Institute of Diplomacy and Foreign Relations of Malaysia (IDFR), 17 Februari hingga 2 Maret 2014, Tun Mahathir Mohamad dan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla kembali menyinggung persolan perang. Keduanya mengatakan bahwa perang adalah suatu tindak kriminal yang sudah sepatutnya dihindari dan dibenci oleh setiap orang. Menciptakan perdamaian yang didambakan oleh setiap orang bukanlah dengan peperangan, melainkan dengan mengembangkan relasi antar bangsa atau antar pihak yang berkonflik.

Kemudian pada pelaksanaan MGPS ketiga di UMY, pada 1 hingga 10 Desember 2014, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dr. Dino Patti Djalal mengatakan bahwa untuk menciptakan perdamaian salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan kearifan lokal. Kearifan lokal yang ada di setiap negara maupun daerah, yang mengandung banyak nilai-nilai dan kebijakan-kebijakan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal penyelesaian konflik, bisa dijadikan cara untuk meredakan peperangan dan menciptakan perdamaian.

Sedang pada kegiatan MGPS keempat yang diselenggarakan di Putrajaya International Convention Center, tepatnya di Kantor Yayasan Kepemimpinan Perdana, Kuala Lumpur – Malaysia, pada 15 September 2015 yang lalu, Tun Mahathir mengatakan bahwa perdamaian itu sejatinya menunjukkan jati diri setiap orang. Tidak ada seorang pun di dunia ini menurutnya yang tidak menginginkan perdamaian. Apalagi pelajaran tentang perdamaian dan menyelesaikan segala bentuk konflik atau permasalahan dengan jalan damai, sudah diajarkan sejak seseorang itu duduk di bangku Taman Kanak-kanak (TK). Karena itulah ia selalu mengajak pada setiap elemen masyarakat dunia untuk tidak lagi menyelesaikan konflik dengan jalan peperangan. Sebab untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ini, peperangan harus dihentikan. (sakinah)

# Pemimpin Bertanggung Jawab Atas Terjadinya Perang

---

Pemimpin negara memang memiliki tanggung jawab besar pada rakyatnya. Bahkan, pemimpin negara juga bertanggung jawab atas terjadinya perang. Meski begitu, perang bukanlah jalan untuk mewujudkan perdamaian dunia. Sebab perang hanya akan menimbulkan kerugian-kerugian, baik pada negara maupun rakyatnya.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad saat menjadi keynote speaker dalam acara opening ceremony Mahathir Global Peace School (MGPS) yang pertama di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), pada Senin 3 Juni 2013.

Dalam pemaparannya Mahathir mengatakan bahwa pemimpin negara memiliki kuasa untuk mengomando anak buahnya melakukan perang. Padahal, dalam perang, membunuh satu orang sama dengan membunuh 1000 orang.

"Jadi, yang bertanggung jawab atas terjadinya perang itu adalah pemimpin negara. Pelaku kejahatan yang sebenarnya dalam perang, bukanlah para pasukannya, tapi pemimpinnya," ujarnya.

Oleh karena itulah, rakyat seharusnya bisa memilih pemimpin yang lebih cinta damai. Memilih pemimpin yang bisa dan mau mengkriminalkan perang. "Sebab, tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh rakyat dengan terjadinya peperangan itu. Rakyat hanya akan dibuat sengsara dengan adanya perang," paparnya lagi.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa perdamaian dunia adalah tugas bersama. Untuk mewujudkan perdamaian dunia dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik itu rakyat, pemerintah, aparat keamanan, komunitas, dan agama.

Din juga menyampaikan bahwa saat ini bukan lagi peperangan yang krusial, namun lebih pada ketiadaan perdamaian. "Ketidakadilan global merupakan akar penunjang terjadinya perpecahan, sehingga konflik dan peperangan pun terjadi," pungkasnya. (Fahmi)

# Buya Syafii : Peradaban Modern Lahirkan Manusia Konsumtif

---

Peradaban modern seperti rumah laba-laba yang terlihat hebat dan mengesankan. Namun di dalamnya hanya terdapat masyarakat yang ingin memiliki sesuatu sebanyak-banyaknya atau manusia konsumtif.

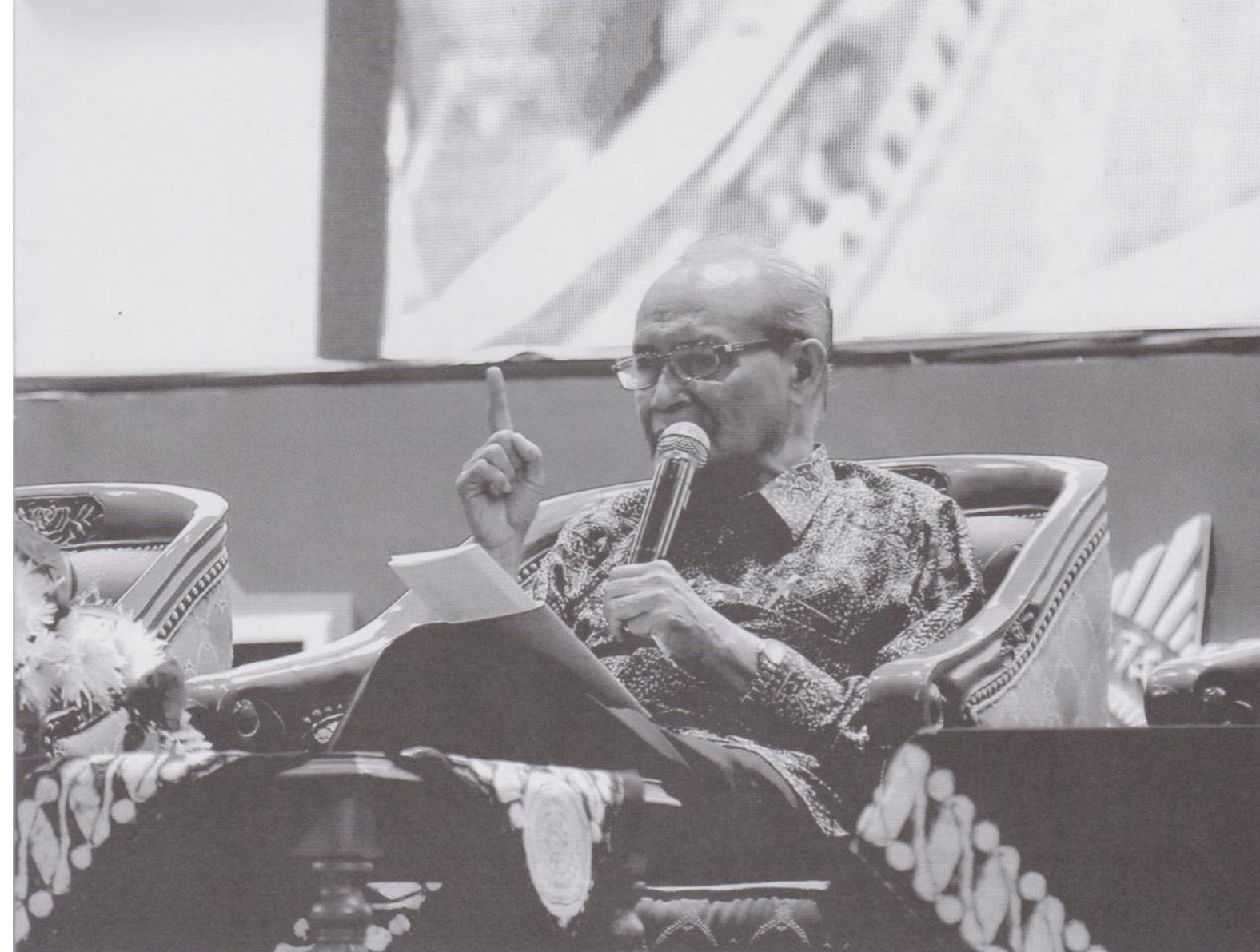
Demikian disampaikan oleh Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif dalam Kuliah Umum "Ethics, Inter religious Dialogue, War, and Peace" dalam Mahathir Global Peace School (MGPS) pertama yang bertajuk "Global Peace and Conflict Resolution", di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Senin, 10 Juni 2013.

Syafii menjelaskan bahwa era modern saat ini hanya menciptakan manusia yang tidak berguna. "Mereka akan menciptakan barang-barang yang tidak berguna, yang nantinya manusia lainnya hanya akan berlomba-lomba untuk mendapatkan barang yang sama sekali tidak berguna tersebut," jelasnya.

Buya memaparkan bahwa di saat seperti ini seharusnya peran agama sangat ditekankan. "Agama dan kehidupan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Agama merupakan keperluan pribadi manusia untuk mengatur kehidupan manusia," paparnya.

Namun, agama saat ini tidak lagi menjadi bagian penting dari kehidupan manusia. "Peradaban modern membawa manusia menjadi tidak percaya terhadap Tuhan dan agamanya, mereka berpikir bahwa percaya adanya Tuhan adalah hal gila karena tidak ada yang bisa membuktikan kebenaran adanya Tuhan," imbuhnya.

Sikap tidak percaya terhadap Tuhan dan agama itulah yang akan menimbulkan masalah-masalah yang semakin kompleks di masa ini. "Bahkan hal ini akan membuat gagasan tentang keadilan dan semangat kemanusiaan yang selama ini diajarkan oleh agama sudah semakin menghilang karena pemikiran modern," pungkas Syafii.



Buya Syafi'i saat menghadiri acara rangkaian Konferensi Nasional Indonesia Berkemajuan 2016

Bahkan, lanjut mantan Ketua PP Muhammadiyah ini, sekarang ini agama juga dijadikan alat untuk melakukan kekerasan. "Bahkan banyak yang melakukan kekerasan yang mengatasnamakan agama, agama juga digunakan sebagai alat untuk memperoleh kepentingan pribadi seseorang," tandasnya.

Selain itu, Buya menuturkan bahwa manusia tanpa agama hanya akan merusak moral manusia itu sendiri. "Hal tersebut akan menyebabkan krisis moral manusia. Untuk itu, perlu adanya korelasi antara manusia dan agamanya, sehingga akan menciptakan perdamaian yang sesungguhnya di masa depan," tuturnya. (Ahlul)

*"Banyak yang melakukan kekerasan yang mengatasnamakan agama, agama juga diperoleh untuk kepentingan pribadi"*



Potret Dokumentasi saat diberlangsungkannya MGPS yang ke-2

## Mahathir Mohamad : Rakyat Harus Pilih Pemimpin Yang Cinta Damai

Peperangan yang menjadi salah satu penyebab mudarnya perdamaian di dunia, banyak dipengaruhi oleh pimpinan sebuah negara. Pemimpin negara juga harus ikut bertanggung jawab atas terjadinya peperangan itu. Sebab pemimpinlah yang memberikan komando ke anak buahnya untuk melakukan peperangan. Oleh karena itulah, menurut Tun Mahathir Mohamad, rakyat seharusnya bisa memilih pemimpin yang lebih cinta damai. Memilih pemimpin yang bisa dan mau mengkriminalkan perang. Karena tidak ada keuntungan yang didapatkan oleh rakyat dengan terjadinya peperangan itu. Rakyat hanya dibuat sengsara dengan adanya perang.

Ketika menjadi *keynote speech* dalam acara NGO Summit on the Prevention of Drug and Substance Abuse di UMY pada 4 Juni 2013, Mahathir kembali menyampaikan perhatiannya tentang perang, kebanyakan orang akan berbicara tentang siapa yang menjadi pahlawan, dan hal-hal lainnya seperti kemuliaan atau kebanggaan. "Mereka tidak pernah menceritakan pada kita tentang mengerian peperangan, jumlah orang yang terbunuh, orang-orang tak bersalah yang terluka, bahkan prajurit yang kembali dalam keadaan terganggu mentalnya (gila), dan mungkin sudah tidak mempunyai kaki atau lengan. Jadi, ini adalah kejadian menyedihkan yang sangat besar," ungkapnya.

Namun, Mahathir juga mengatakan bahwa perjuangan seperti ini, untuk mengubah persepsi manusia tentang kejahatan perang, bukanlah hal mudah dan membutuhkan waktu yang lama. "Tetapi, bagi orang-orang di beberapa negara seperti Eropa, Amerika, dan Canada, perang sudah dianggap sebagai kejahatan. Jadi, Indonesia dan Muhammadiyah juga harus mendukung gerakan ini. Dan kita harus menghentikan perang, karena kita masih punya masalah lain yang perlu diselesaikan, daripada melakukan peperangan dan saling bunuh," imbuhnya.

Himbauan Mahathir Mohammad itulah yang telah membuat Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bertekad untuk menghentikan perang di dunia dan membentuk perdamaian dunia, dengan berkomitmen mengadakan

Mahathir Global Peace School (MGPS) setiap tahunnya dengan menggandeng Yayasan Perdana Global Peace Foundation (PGPF), Malaysia. Tahun 2014 untuk kedua kalinya MGPS kembali diselenggarakan di Institute of Diplomacy and Foreign Relations of Malaysia (IDFR) dengan mengangkat tema "Inter-state Diplomacy and Economic Justice for Global Peace and Conflict Resolution" yang berlangsung selama 2 pekan, terhitung sejak Senin 17 Februari 2014 hingga Minggu 2 Maret 2014. MGPS kedua ini pun sama halnya seperti MGPS pertama yang telah terselenggara di UMY, pada 3 hingga 15 Juni 2013. Salah satu tujuan dari dibentuknya Sekolah Perdamaian ini pun untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai perdamaian global dan resolusi konflik, baik itu dalam hal perang, kemiskinan, rasisme, keamanan, intervensi agama, manusia, maupun gender.

Selain itu, MGPS ini juga akan menjadi pintu gerbang para akademisi maupun pemimpin-pemimpin di dunia, untuk mengetahui bahwa mereka berperan dalam membentuk perdamaian global dan menawarkan resolusi konflik yang baru melalui pendidikan dan pemahaman multi-budaya. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam sambutannya pada acara pembukaan MGPS yang pertama. Din mengatakan bahwa perdamaian dunia adalah tugas bersama. Untuk mewujudkan perdamaian dunia ini pun dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, baik itu rakyat, pemerintah, aparat keamanan, komunitas, agama, maupun akademisi.

Adapun narasumber pada acara MGPS kedua ini juga mendatangkan beberapa ahli baik dari Indonesia maupun Malaysia. Narasumber tersebut seperti Tun Dr. Mahathir Muhammad (Former Prime Minister of Malaysia The President of PGPF), Dr. M. Jusuf Kalla (Wakil Presiden RI), Prof. Dr. M. Din Syamsuddin (Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah), Prof. Dr. A. Syafi'i Ma'arif (Mantan Ketua umum PP Muhammadiyah), Prof. Johan Galtung (Transcend International), General Tan Sri Mohd Azumi Mohamed (Rtd) (Perdana Global Peace Foundation, Malaysia), Dr. Surwandono (Dosen Hubungan Internasional UMY), Rudi Sukandar, Ph.D. (The Habibie Center), Prof. Guardial Singh Nijar (University of Malaya), Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Irfan AmaLee, M.A. (Co-Founder and Director of Peace Generation Indonesia), Prof. Chandra Muzaffar (President, International Movement for a Just World Universiti Sains Malaysia), Hilman Latief, Ph.D. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Prof. Amin Abdullah (Rektor UIN Yogyakarta), Jeremy England (ICRC Kuala Lumpur), Lina A. Alexandra, dan Brigjen (TNI) Drs. Jan Pieter Ate, M.Bus, MA (Direktur Kerjasama Internasional Kementerian Pertahanan RI). (sakinah)



## Jusuf Kalla : Kembangkan Relasi Antar Bangsa Untuk Atasi Konflik

Saat ini sudah bukan masanya lagi perang digunakan sebagai sarana penyelesaian masalah atau konflik. Idiom yang mengatakan "jika ingin damai bersiaplah untuk perang" sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan politik internasional saat ini. Lebih baik saat ini kita menyoroti pentingnya mengembangkan relasi antar bangsa atau antar pihak yang berkonflik.

Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla dalam pembukaan acara Mahathir Global Peace School (MGPS) ke-2 yang diselenggarakan di IDFR ( Institute of Diplomacy and Foreign Relations) Malaysia, Senin (17/2).

Menurut Jusuf Kalla, proses perdamaian antara China dan Taiwan juga bisa dijadikan contoh pengembangan relasi antar bangsa dalam meredam konflik dan peperangan. Dua negara tersebut menurutnya menunjukkan bagaimana relasi ekonomi bisa meredam konflik yang bisa berujung pada perang.

Pengembangan relasi antar negara ini juga bisa menetralkan rasa takut yang menurut JK merupakan penyebab timbulnya perang. Menurutnya, rasa takut itu seringkali membawa akibat respon yang sangat emosional dalam menanggapi persoalan. "Pengembangan relasi antar negara adalah bagian dari diplomasi yang bisa meningkatkan saling mengerti antar pihak dan mereduksi potensi konflik antar negara. Selain itu ada pilihan lain untuk menyelesaikan seperti kompromis, dialog dan win-win solution. Namun semua upaya tersebut harus diawali dari proses pelucutan senjata," ujarnya.

Sementara itu, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Mantan Perdana Menteri Malaysia mengatakan dalam pemaparannya bahwa masyarakat dunia harus mengubah pola pikir tentang perang. Perang, menurutnya bukanlah sesuatu yang dibenarkan (dilegitimasi), tapi perang adalah kriminal dan melanggar hukum. Hal ini karena perang mengakibatkan kerugian nyawa, harta, dan rusaknya tatanan politik sosial negara dunia.

Selain itu, jika dalam kacamata hukum seorang yang membunuh orang lain bisa dianggap kriminal dan harus dihukum, sementara ketika seorang pemimpin yang memerintahkan tentaranya untuk membunuh orang sebanyak-banyaknya sebagai satu-satunya cara untuk memenangkan perang, malah sulit disebut sebagai kriminal. "Bahkan, pemimpin yang dapat memenangkan perang mendapat penghargaan, dielu-elukan, dan dianggap sebagai pahlawan. Konstruksi inilah yang seolah-olah menjadikan perang sebagai suatu yang dilegitimasi. Karena itu, pola pikir inilah yang harus diubah, dan menjadikan perang sebagai sesuatu yang kriminal dan melanggar hukum."

Mahathir juga menyampaikan bahwa kemampuan memenangkan perang itu juga sangat diuntungkan dengan kemajuan teknologi yang tinggi, seperti senjata nuklir yang memungkinkan terjadinya kerusakan. Selain itu, mereka juga menggunakan media sebagai sarana menggiring opini untuk membenaran kebijakan perang dan organisasi internasional sebagai sarana disahkannya peperangan. "Padahal, masih banyak opsi lain yang bisa dipilih untuk menyelesaikan masalah selain dengan perang. Kita masih bisa menggunakan negosiasi, diskusi meja bundar, atau penyerahan ke pihak ketiga. Dan jika semua opsi tersebut gagal, masih ada pilihan untuk memanfaatkan hukuman perdata (court of justice)," paparnya.

Di sisi lain, Din Syamsudin dalam sambutannya mengatakan bahwa pemikiran Mahathir tentang kriminalisasi perang bisa dianggap sebagai pemikiran baru yang ia sebut sebagai Mahathir School of thought. "Pemikiran Mahathir ini sejalan dengan dua karakteristik utama Islam yaitu *Peace and Justice*," tuturnya.

Selain itu Din juga menyebut bahwa major power di dunia ini adalah para investor perang, karena perang menjadi sarana pencapaian kepentingan jangka panjang mereka. (Fahmi)

# Perdamaian Dapat Terwujud Jika Saling Menghormati Perbedaan

Penghormatan terhadap keberagaman menjadi isu yang penting untuk dipahami dalam interaksi antar bangsa. Karena kegagalan memahami esensi keberagaman akan mematikan potensi konflik. Dalam konteks perdamaian dan kemanusiaan, pemahaman dan penghormatan terhadap keberagaman menjadi kunci bagi upaya pencapaian perdamaian.

Oleh karenanya setiap individu harus memahami keberagaman sebagai nilai yang selalu menjadi referensi dalam pergaulannya dengan individu lain. Pikiran yang terbuka juga sangat penting dalam proses memahami keberagaman. Dengan pikiran yang terbuka, seseorang akan memiliki toleransi dan jauh dari prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain seperti menghakimi orang lain tanpa mengetahui kondisi sebenarnya, serta dapat menghindari munculnya *stereotype* terhadap kelompok tertentu yang bisa memicu konflik.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Major Mohd Riduan dalam salah satu sesi acara Mahathir Global Peace School (MGPS) 2014 yang diselenggarakan di Institute of Diplomacy and Foreign Relations, Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 27 Februari 2014. MGPS kedua yang diselenggarakan oleh UMY dan PGPF Malaysia ini berlangsung hingga 1 Maret 2014.

Keberagaman menurut Riduan, mengacu kepada berbagai perbedaan dalam hal etnis, ras, latar belakang profesional, agama atau kepercayaan politik dan lain sebagainya. Riduan menuturkan, pemahaman tentang keberagaman seperti fenomena gunung es yang hanya tampak 10 % dari apa yang dilihat, didengar dan dirasakan seperti warna kulit, bahasa, dialek, etnis dan lainnya. Sementara bagian terbesar yang berada di bawah sering kali diabaikan. Hal itulah yang sering memicu persoalan dalam hubungan antar individu, bangsa atau negara. "Suatu

*"Suatu negara juga akan gagal membangun perdamaian di negaranya apabila pemahaman terhadap keberagaman masih rendah"*

negara juga akan gagal membangun perdamaian di negaranya apabila pemahaman terhadap keberagaman masih rendah," katanya.

Menurut Riduan, menjalin komunikasi yang baik dengan individu lain juga merupakan usaha memahami keberagaman. Dalam menjalin komunikasi antar bangsa yang beragam, sebaiknya komunikasi dilakukan dengan bahasa-bahasa umum yang dapat dimengerti kedua belah pihak. Riduan melanjutkan, memberi waktu lawan bicara untuk merespon pembicaraan juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan saat berkomunikasi. Selain itu, mengamati perbedaan dan belajar dari perbedaan tersebut akan membuat kita lebih berhati-hati dan menyesuaikan diri saat berkomunikasi dengan orang yang berbeda latar belakang budayanya. "Melempar humor dengan orang yang berbeda latar belakang juga harus hati-hati, karena berbeda latar belakang berbeda juga interpretasinya," tandasnya. (Asri)

## Pemerintah Harus Lebih Perhatikan Local Wisdom Untuk Menyelesaikan Konflik

Isu perdamaian masih menjadi perbincangan hangat di kalangan banyak orang, tidak sebatas pada kelompok pemerhati perdamaian namun juga termasuk para akademisi. Akan tetapi, upaya resolusi atau penyelesaian konflik antar negara atau kelompok yang bertikai terkadang tidak mendapatkan porsi khusus dari pemerintah setempat. Contohnya di Indonesia sendiri, pemerintah daerah maupun pusat tidak memiliki catatan ataupun dokumentasi terperinci mengenai resolusi konflik maupun local wisdom untuk dijadikan pelajaran jika menghadapi konflik serupa di kemudian hari. Hal ini seharusnya menjadi perhatian dan fokus para pejabat pemerintah untuk juga mempertimbangkan kearifan lokal yang ada di setiap negara maupun di daerah sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan konflik.

Demikian disampaikan Dr. Dino Patti Djalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, saat menjadi keynote speech dalam acara Opening Ceremony Mahathir Global Peace School (MGPS) ketiga "Interstate Relation and Global Justice for Peace and Conflict Resolution", yang diselenggarakan pada Senin, 1 Desember 2014, di ruang sidang AR. Fachruddin B lantai 5 Kampus Terpadu UMY. Acara yang diselenggarakan atas kerjasama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan Perdana Global Peace Foundation (PGPF) ini berjalan selama 10 hari, sejak Senin (1/12) hingga Rabu (10/12).

Dalam paparannya, Dino juga menyampaikan, Indonesia sebagai negara yang kaya akan kearifan lokal seharusnya bisa menggunakan kearifan lokal (*local wisdom*) itu untuk resolusi konflik. Sebab menurutnya, dalam kearifan lokal banyak mengandung kebijakan-kebijakan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan konflik. "Indonesia harus bisa menggunakan local wisdom ini sebagai salah satu instrumen penyelesaian konflik. Namun yang masih disayangkan hingga saat ini, local wisdom yang berasal dari seluruh penjuru Nusantara ini juga tidak terdokumentasikan dengan baik. Indonesia punya banyak local wisdom, tapi tidak punya indeks atau kategori untuk local wisdom itu agar bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam membangun kerukunan antar individu maupun kelompok," paparnya.



Dino Patti Djalal saat hadir di serangkaian MGPS ke-3

Untuk itulah acara seperti MGPS tersebut, menurut Dino, menjadi salah satu cara bagi Indonesia maupun negara lain untuk terus menggali upaya-upaya penyelesaian konflik di negaranya. Apalagi dengan adanya keinginan untuk menciptakan perdamaian di dunia. Semua negara juga patut untuk saling mengenal keragaman sosial, tradisi, budaya dan agama di negara lain. Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) ini juga menyampaikan agar globalisasi yang kini tengah dihadapi oleh negara-negara di dunia, harus dihadapi dengan pikiran terbuka dan positif. "Era globalisasi saat ini harus kita lihat sebagai sebuah peluang. Kita punya kesempatan lebih di era globalisasi ini untuk bisa berkiprah di dunia internasional, termasuk upaya kita untuk menciptakan perdamaian," ungkapnya.

Selain Dino Patti Djalal, pembicara lainnya yang juga turut menyumbangkan pemikirannya untuk menemukan penyelesaian konflik di dunia, seperti Prof. Johan Galtung (Transcend), Tan Sri Dato' Seri Utama Dr. Rais Yatim (PGPF), Andrew James Bartles-Smith (ICRC), Emma Leslie (Center for Peace and Conflict Studies, Cambodia), Prof. Tulus Warsito (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Prof. Alberto Gomes (DEEP La Trobe University-Australia), Tan Sri Gen. (Rtd.) Mohd. Azumi (PGPF-Malaysia), Dr. Maung Zarni (LSE-London), Prof. Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada), dan Dr. Martino Sardi (PSPH-UMY). Serangkaian dengan acara pembukaan MGPS pada 1 Desember 2014 ini juga dilaksanakan peresmian Pusat Studi Perdamaian dan Humaniter (PSPH UMY) dan Soft-launching untuk buku *Global Peace for Justice and Humanity* dimana Dr. Hilman Latief sebagai co-editor. Sementara itu, peserta yang hadir dalam MGPS ketiga ini berasal dari 12 negara, diantaranya Jerman, Australia, Thailand, Kenya, Kamboja, Tiongkok, Filipina, Sudan, Palestina, Turki, Malaysia dan Indonesia. (Icha)

## MGPS Terus Berkomitmen Wujudkan Perdamaian Dunia

Sekolah Perdamaian kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan Perdana Global Peace Foundation (PGPF), Mahathir Global Peace School ketiga resmi ditutup, pada Rabu sore 10 Desember 2013. Berbagai pemikiran dan karya ilmiah dari para pembicara ahli serta 40 partisipan dari berbagai negara dalam kegiatan ini diharapkan mampu diimplementasikan untuk masing-masing negara, khususnya dalam penanganan konflik dan menciptakan perdamaian.

Ketua PGPF, Tan Sri Norian Mai, saat memberikan sambutannya dalam acara Closing Ceremony The 3rd Mahathir Global Peace School "Migration, Border & Global Peace", di ruang sidang Gedung AR. Fachruddin A kampus terpadu UMY, Rabu siang (10/12) mengatakan, kegiatan MGPS itu bukan hanya kegiatan yang dijalani oleh beberapa orang untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru. Namun lebih dari itu, MGPS bertujuan untuk membangun pemikiran yang sama dari para partisipannya dalam menciptakan perdamaian di masing-masing negara. "Kita juga ingin melihat, bagaimana implementasi perdamaian di masing-masing negara asal kita. Karena jika kita hanya fokus pada masalah perang tanpa memikirkan solusi untuk perdamaian, tanpa solusi bersama maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebab peperangan itu tidak sepenuhnya benar," ungkapnya.

Oleh sebab itulah Tan Sri Norian Mai mengajak semua orang yang peduli akan perdamaian dunia agar cepat bertindak untuk menciptakan perdamaian tersebut. Salah satu caranya adalah melalui kegiatan seperti MGPS ini. "Kita harus bertindak untuk menciptakan perdamaian. Banyak yang membahas tentang perdamaian, tapi masih sedikit yang membahas dan melihat bagaimana perdamaian dunia yang sebenarnya. Karena itulah melalui MGPS ini kami berharap, ide-ide yang dihasilkan dari kegiatan ini dapat memberi-

kan kontribusi nyata untuk perdamaian dunia," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Hilman Latief, Ph.D selaku ketua scientific committee MGPS. Menurut Hilman, kegiatan MGPS merupakan salah satu kepedulian para kalangan akademisi, mahasiswa, serta pemerintah dari berbagai negara, pada dunia. "Ini adalah salah satu bentuk kepedulian kita akan mimpi kita untuk menciptakan perdamaian dunia. Dan kami berharap, kegiatan serta ide-ide yang dihasilkan dalam kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masa depan kita dan dunia," tuturnya.

Namun, menurut Hilman, sekolah perdamaian atau MGPS itu bukanlah kegiatan akhir dalam upaya ikut menciptakan perdamaian di dunia. Sebab masih akan ada tugas-tugas lainnya di masa yang akan datang setelah MGPS tersebut. "Ini bukan kegiatan terakhir kita. Masih ada tugas lagi di masa yang akan datang setelah MGPS ini. Karena itu, ceritakan pada semua orang di negara-negara asal kita, untuk menjadi agen perdamaian di mana pun mereka berada. Dan dengan begitu, perdamaian dunia yang kita impikan itu akan terwujud," paparnya.

Acara MGPS ketiga yang diselenggarakan selama 10 hari sejak 1 hingga 10 Desember 2014 ini, juga mendatangkan "the Father of Peace Studies", Prof. Dr. Johan Galtung, sebagai salah satu pembicara ahli. Pada kesempatannya saat menyampaikan materi dalam sesi kelas MGPS, Jum'at (5/12) ia menyampaikan sebuah metode baru dalam mengatasi dan menganalisa konflik, yakni dengan menggunakan "segitiga konflik dan garis waktu". Metode ini merupakan tehnik menceritakan perkembangan konflik yang terjadi, serta melihat konflik dari berbagai sisi, baik itu dari sisi Direct Violence (kekerasan langsung), Cultural Violence (kekerasan kultural), dan Structural Violence (kekerasan struktural). Sebab menurutnya, segala kemungkinan itu bisa menjadi awal pemicu terjadinya konflik. (Shidqi)

# Perang Bukan Solusi Dari Konflik, Inisiator Perang Harus Dihukum

PUTRAJAYA – Peperangan yang saat ini banyak terjadi, sebenarnya memang bermula dari adanya konflik. Konflik yang terjadi di sebuah negara ataupun antar negara itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya perang. Padahal, untuk menyelesaikan konflik tersebut ada banyak cara lain yang bisa digunakan. Sebab perang itu bukanlah solusi dari segala sesuatu, termasuk pula bukan solusi untuk menyelesaikan konflik.

Karena itulah, masyarakat dunia juga semestinya mengetahui dan menyadari akan kerugian yang ditimbulkan dari peperangan tersebut. Selain karena peperangan saat ini yang semakin brutal, perang yang terjadi saat ini pun seolah menjadi sebuah misi pembunuhan. Oleh sebab itu, orang yang menyebabkan perang itu terjadi, sudah selayaknya dihukum dan dipenjara.

Demikian pemaparan Tun Dr. Mahathir Mohammad, saat menjadi keynote speech dalam acara Mahathir Global Peace School (MGPS) pada Selasa, 15 September 2015 di Putrajaya International Convention Center, tepatnya di Kantor Yayasan Kepemimpinan Perdana, Kuala Lumpur – Malaysia. MGPS keempat yang bertemakan "Justice, Prosperity and Peace for Global Citizens" ini kembali diselenggarakan oleh Perdana Global Peace Foundation (PGPF) bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan berlangsung hingga Jum'at, 18 September 2015.

Menurut Tun Mahathir, terjadinya perang itu dapat menghancurkan sebuah negara. Karena banyak korban jiwa yang berjatuhan. Bahkan mirisnya lagi, banyak negara yang saat ini justru saling beradu dalam peperangan dan tidak peduli siapa yang menjadi korbannya. "Manusia saat ini sangat primitif. Mereka saling bertengkar dan membunuh satu sama lain. Saling berperang untuk bisa menjadi pemenang. Tapi setelah mereka menang, apa yang akan mereka dapat? Justru korban peperangan yang akan mereka dapatkan, karena perang saat ini sangat brutal dan tidak memandang siapa yang menjadi korbannya," tegasnya.

Mahathir juga menjelaskan, bahwa konflik yang terjadi di suatu negara bisa saja dibuat menjadi sebuah peperangan. Karena itulah mengapa dirinya mengajak pada semua elemen masyarakat dunia untuk tidak lagi menyelesaikan konflik dengan perang. Selain itu, ia juga menganjurkan agar orang-orang yang menyebabkan peperangan (inisiator perang) itulah yang seharusnya mendapatkan hukuman dan dipenjara. "Perang itu adalah kejahatan yang sangat buruk sekali. Jika kita bisa menghukum orang yang membunuh satu nyawa manusia, maka kita juga harus

bisa menghukum orang yang telah membunuh jutaan nyawa manusia. Mereka yang telah membunuh jutaan manusia itu harus mendapatkan hukuman dan dipenjara, kalau kita memang ingin mewujudkan perdamaian," jelasnya.

Sebab setiap orang itu, lanjut Mahathir, pada dasarnya pasti menginginkan perdamaian bukan peperangan. "Perdamaian itu menunjukkan jati diri setiap orang, bahwa mereka ingin perdamaian. Saya percaya kalau semua dari kita ini sudah pernah mendapatkan pelajaran tentang perdamaian dalam kurikulum sekolah kita. Bahkan mungkin kurikulum tentang perdamaian itu sudah diajarkan sejak kita masih bersekolah di Taman Kanak-kanak (TK). Karena itulah, Malaysia, Indonesia dan Singapura juga harus setuju untuk menyelesaikan permasalahan dan konfliknya tanpa perang, melainkan dengan jalan perdamaian," paparnya.

Namun meski demikian, Mantan Perdana Menteri Malaysia ini juga menyadari bahwa untuk menghentikan peperangan dan mewujudkan perdamaian di seluruh negeri yang sedang berkonflik itu, memang butuh proses. Tapi ia tetap optimis bahwa perdamaian tersebut akan terwujud, dengan lebih bersabar dan bisa mengambil langkah tepat untuk menghentikan perang tersebut. "Mungkin memang butuh waktu untuk mewujudkan perdamaian di muka bumi ini. Tapi kita juga harus percaya dan lebih bersabar untuk hal itu, serta harus bisa mengambil langkah yang tepat untuk menghentikan perang. Dan setidaknya, langkah pertama yang bisa kita ambil saat ini adalah melalui sekolah perdamaian ini, yang merupakan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia untuk mewujudkan perdamaian dan menyelesaikan konflik tanpa peperangan," pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan Sekjen PP Muhammadiyah, Dr. H. Abdul Mu'ti. Menurutnya, perang bukanlah cara untuk menyelesaikan konflik. Ada banyak cara yang bisa dilakukan suatu negara dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, salah satunya seperti dengan cara berdialog atau saling bertukar budaya. "Kita tidak bisa menyelesaikan konflik itu dengan cara perang. Karena itu bukan solusi yang tepat. Salah satu cara yang bisa kita lakukan dalam menghadapi dan menyelesaikan konflik adalah dengan dialog atau melalui cultural movement (pertukaran budaya). Sekalipun cultural movement ini adalah pola, tapi ini bisa jadi salah satu cara kita untuk mewujudkan perdamaian dan bisa menyelesaikan konflik," ujarnya.

Selain melalui pertukaran budaya dan saling memahami budaya negara lain, berdialog menurut Mu'ti juga bisa dijadikan salah satu instrumen dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Belajar dari pengalaman konflik yang pernah terjadi di Indonesia, Mu'ti mengatakan bahwa dialog itu juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan perdamaian. "Di Indonesia sendiri juga tidak pernah terlepas dari yang namanya konflik. Namun kami selalu berusaha untuk menyelesaikan konflik tersebut bukan dengan jalan perang, tapi dengan berdialog dan saling bertukar pikiran serta memahami budaya daerah-daerah setempat. Dari pengalaman tersebut kemudian kami jadikan pelajaran bahwa memang dengan berdialog, konflik yang terjadi itu bisa diselesaikan dengan jalan damai. Cara ini tentunya bisa menjadi kontribusi kita bagi dunia dalam mewujudkan perdamaian di muka bumi ini," tutupnya. (sakinah)

*"Kita tidak bisa menyelesaikan konflik itu dengan cara perang, karena itu bukan solusi yang tepat"*

# Masalah Timur Tengah Adalah Masalah Bersama

Permasalahan dan konflik berkelanjutan yang terjadi di negara-negara di kawasan Timur Tengah bukan saja menjadi permasalahan dari negara yang bersangkutan. Bahkan konflik dan masalah yang terjadi di negara-negara tersebut tidak seharusnya pula hanya mendapat perhatian kecil dari negara-negara lainnya. Karena konflik dan masalah yang terjadi di negara-negara Timur Tengah tersebut juga merupakan masalah bersama masyarakat dunia.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. H. Abdul Mu'ti saat menjadi pembicara dalam sesi Kuliah Umum pada rangkaian acara Mahathir Global Peace School (MGPS) keempat di Putrajaya International Convention Center, pada Selasa, 15 September 2015. Menurutnya, jika berbicara tentang masyarakat dunia, maka segala permasalahan dan konflik yang terjadi di negara lain adalah masalah bersama. Sekalipun sebenarnya seseorang itu tidak bisa melepaskan identitas negaranya, namun seseorang tetap menjadi bagian dari masyarakat dunia. "Kita memang harus menjaga identitas negara kita sendiri. Tapi kita ini juga termasuk dalam bagian masyarakat dunia. Untuk itulah masalah dan konflik yang terjadi di negara lain itu juga harus menjadi masalah kita bersama. Dan kita pun harus ikut membantu mereka dalam menyelesaikan masalah dan konflik yang terjadi," paparnya.

Mu'ti juga menyampaikan, bahwa masyarakat dunia itu tak seharusnya pula apatis dengan masalah yang dialami oleh negara lain. Apalagi hingga tidak peduli dan tidak menolong mereka saat mereka sedang membutuhkan pertolongan. "Negara kita aman, terhindar dari konflik dan perang. Tapi bukan berarti

kita harus diam saja dan tidak peduli dengan konflik yang terjadi di negara lain. Kita tetap harus membantu dan ikut memikirkan bagaimana kita bisa memberikan kontribusi pada mereka yang menjadi korban konflik tersebut," ujarnya.

Pada kesempatan lain, Mu'ti pun sempat menyinggung kondisi pengungsi Suri'ah yang diperlakukan kurang baik oleh negara lain. Menurutnya, negara yang menjadi tempat tujuan sementara bagi para pengungsi tersebut tak sepatutnya memberikan mereka banyak aturan, jika ingin singgah di negaranya. Bahkan tak sepatutnya pula menjadi tempat bagi negara tersebut untuk dengan sengaja menyebarkan agamanya secara paksa kepada para pengungsi. "Kalau apa yang diberitakan itu benar, maka yang dilakukan oleh negara-negara tersebut salah. Apalagi jika memang benar terbukti bahwa pihak negara dengan sengaja menyuruh para pengungsi tersebut pindah agama terlebih dahulu, agar bisa masuk ke negaranya," ungkapnya.

Untuk itulah, Mu'ti pun menyarankan pada pemerintah Indonesia untuk bisa membantu para korban perang dan konflik tersebut. Mu'ti juga meminta pemerintah Indonesia agar tidak apatis dalam memandang permasalahan tersebut. "Indonesia dan pemerintah Indonesia seharusnya tidak hanya diam saja melihat kondisi dan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Indonesia ini kan kaya, sudah seharusnya pula bisa membantu para korban konflik tersebut. Apalagi Indonesia ini juga punya banyak pulau, akan sangat bagus kalau Indonesia ini bisa memberikan kontribusi dengan menyediakan satu pulau bagi para pengungsi tersebut. Dengan begitu kita bisa memberikan bantuan nyata pada korban konflik dan perang itu," tegasnya.

(sakinah)

## MGPS Kelima Libatkan Beragam Partisipan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) bekerjasama dengan Perdana Global Peace Foundation (PGPF) Malaysia, kembali menyelenggarakan Mahathir Global Peace School (MGPS). Pada MGPS kelima yang diselenggarakan pada 25 November hingga 5 Desember 2015 kali ini, bisa dikatakan cukup berbeda dengan MGPS sebelumnya. Jika pada MGPS sebelumnya hanya melibatkan mahasiswa atau peneliti, maka pada MGPS kelima ini partisipan yang dilibatkan lebih beragam karena berasal dari berbagai unsur kalangan, seperti institusi, pemerintahan, mahasiswa dan dosen, aktivis, jurnalis, peneliti, maupun NGO-NGO yang bergerak dan concern di bidang perdamaian dan resolusi konflik.

Sri Atmaja P. Rosyidi, ST., MSc.Eng., Ph.D., PE selaku penanggungjawab MGPS kelima menjelaskan hal tersebut saat ditemui di ruangnya pada Kamis, 27 Oktober 2016. Menurutnya, MGPS kali ini memang melibatkan lebih banyak unsur partisipan. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah agar masyarakat umum mengetahui isu perdamaian dunia. "Awalnya MGPS ini memang dibuat sebagai sekolah singkat (short course) yang bertujuan untuk mengkaji kajian perdamaian. Karena itu target awal pesertanya adalah mahasiswa tingkat akhir dari berbagai jurusan, mahasiswa pascasarjana atau peneliti. Namun kemudian menurut kami, jika kajian perdamaian hanya dilakukan dari

kalangan kampus atau akademisi saja, maka isu tentang perdamaian dunia, penyelesaian konflik dan dialog antar agama hanya akan memiliki lingkup yang kecil, hanya terbatas di kampus. Dan misi untuk mewujudkan perdamaian dunia ini tentunya belum tersampaikan kepada masyarakat. Untuk itulah kami menambah partisipan dari unsur-unsur lain tersebut," jelas Sri Atmaja.

Sri juga menyampaikan bahwa MGPS kelima ini memang dibuat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. "Kami juga ingin melibatkan banyak institusi, baik swasta maupun pemerintahan yang punya concern terhadap perdamaian, resolusi konflik dan dialog antar agama. Tujuannya tidak lain agar kami bisa saling berkolaborasi untuk menyatukan pemikiran tentang perdamaian ini. Selain itu, kami harapkan pula institusi-institusi tersebut ketika mencetak produknya, bisa bersinergi mencetak generasi-generasi yang lebih baik. Generasi yang memahami Global Peace secara nyata dan bisa menghadapi masalah heterogenitas yang ada pada bangsa ini," ujarnya.

Meski menurutnya, hasil dari kegiatan seperti MGPS tersebut tidak bisa dipanen dalam waktu sekarang, tapi setidaknya pihaknya bisa ikut menciptakan sebuah generasi masa akan datang. "Generasi yang memahami bahwa peace atau perda-

maian itu mungkin untuk diwujudkan. Generasi yang memahami bahwa perang bukan langkah penyelesaian konflik yang utama. Meskipun hidup di negara yang tingkat heterogenitasnya tinggi, kita bisa mengembangkan budaya untuk bertoleransi, menjaga perdamaian misalnya. Konflik sangat mungkin terjadi dan bahkan tidak bisa dicegah. Tapi yang terpenting kita tahu membuat resolusi konfliknya,"ujarnya.

Melalui MGPS itu pula, menurut Sri, akan banyak dampak positif yang bisa didapatkan oleh peserta. Salah satunya menciptakan generasi yang mempunyai pemahaman tentang kajian perdamaian. "Dari pelaksanaan MGPS sebelumnya, peserta MGPS ada beberapa dari mereka yang aktif di NGO yang concern pada perdamaian. Kemudian untuk peserta mahasiswa kita harapkan dia mempunyai pemikiran dan pemahaman tentang Global Peace dan menerapkannya ketika sudah selesai menempuh pendidikan dan kembali ke masyarakat," ungapnya. (bagas)

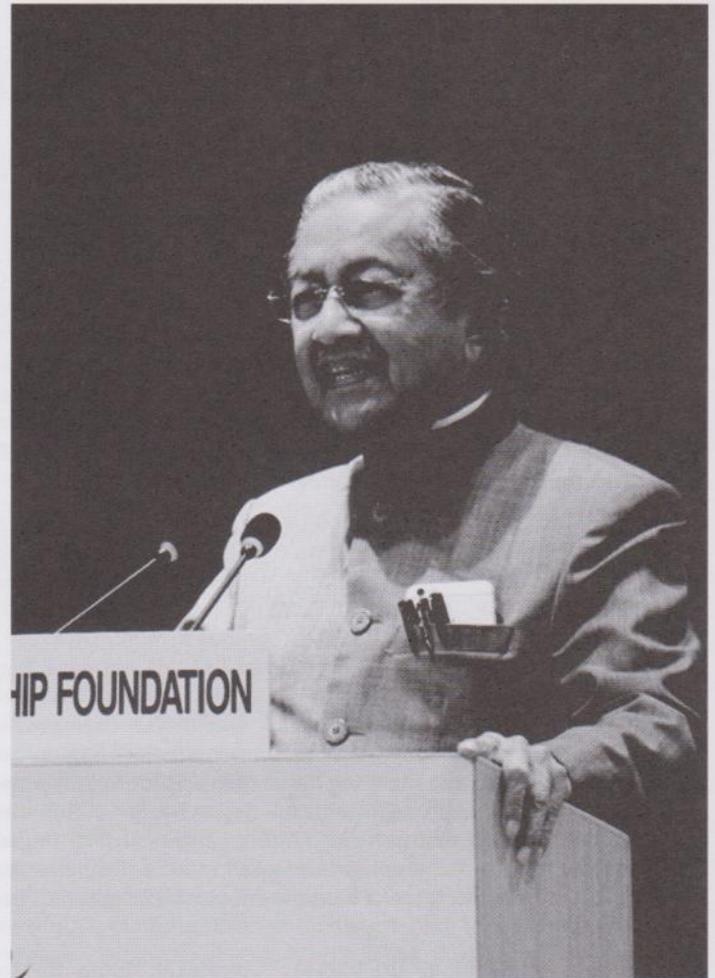
## Perdamaian dan Dialog Antar Agama Harus Jadi Satu Kesatuan

Penanggungjawab Mahathir Global Peace School (MGPS) kelima, Sri Atmaja P. Rosyidi, ST., MSc.Eng., Ph.D., PE menyebutkan bahwa perdamaian dan dialog antar agama harus menjadi satu kesatuan. Keduanya harus menjadi satu kesatuan dalam pendidikan formal dan informal, untuk mewujudkan perdamaian dunia.

Hal tersebut juga sesuai dengan tema yang diangkat pada MGPS kelima yakni "Peace and Inter-religious Dialogue in Worldwide Education", menjadikan perdamaian dan dialog antar agama menjadi satu kesatuan dalam pendidikan formal maupun informal. Tema tersebut diusung agar MGPS mempunyai concern yang kuat dalam perdamaian dan dialog antar agama atau toleransi.

"MGPS mempunyai seri yang berbeda-beda setiap tahunnya. Untuk MGPS tahun ini ada beberapa hal yang dibahas. Pertama, berbicara tentang perdamaian secara umum, kemudian ada resolusi konflik. Yang kedua, kami berbicara tentang migrasi, satu isu yang cukup penting di dunia. Seperti yang terjadi di Suriah, penduduknya melakukan migrasi besar-besaran ke Eropa karena perang. Kemudian kami juga menekankan tentang dialog antar-agama /interfaith dialogue, dan yang terakhir kami bicara tentang etika," tambahnya.

MGPS kelima ini juga menurut Sri, adalah putaran terakhir dari satu round. Namun menurutnya tidak menutup kemungkinan akan ada putaran kedua dari MGPS ini. "MGPS membawa misi. Misi ini dinyatakan dalam tema-tema. Ini adalah tema yang kelima dalam satu putaran. Hal ini tidak menutup kemungkinan kami akan membuat kegiatan yang sama untuk putaran selanjutnya. Mungkin kami akan kembangkan ke format kegiatan yang lain karena intinya adalah inovasi, agar masyarakat umum dapat berpartisipasi dalam kegiatan semacam ini meskipun saat ini



Tun Dr Mahathir Mohamad saat berpidato diserangkaian MGPS ke-4

keterwakilannya terbatas. Kami sebenarnya juga berharap agar daerah-daerah juga ikut berpartisipasi mewujudkan perdamaian, dengan cara menyediakan satu unit bagian yang mengkaji potensi daerahnya terkait hubungan masyarakat, sosial, antropologi, dan sebagainya. Dari situ kita akan mengetahui potensi konflik yang ada di daerah tersebut, sehingga dapat dibuat resolusi konfliknya. Agar masyarakat juga tahu bahwa peace atau perdamaian adalah satu bagian yang harus diwujudkan," tambahnya.

Meskipun begitu menurut Sri, kerjasama UMY-PGPF akan tetap berlanjut kedepannya. Hal ini karena UMY-PGPF memiliki kesamaan visi dalam perdamaian. "Visi kami sama dengan PGPF. Meskipun di dua negara yang berbeda, tapi gerakan kami sama. Dalam hal ini, Muhammadiyah juga aktif dalam perdamaian. Yang menjadi kesamaan kami yaitu dalam agama Islam, terdapat anjuran untuk menciptakan perdamaian. Selain itu, juga semangat dalam bernegara untuk aktif dalam perdamaian dunia yang terdapat pada pembukaan UUD 45. Bagi UMY, kegiatan MGPS ini juga menjadi salah satu media kami untuk berkontribusi secara nyata dalam isu perdamaian dunia," paparnya.

Selain itu, Sri juga berharap agar nantinya pemikiran-pemikiran hasil dari MGPS ini dapat dibukukan dan menjadi kurikulum untuk dapat digunakan masyarakat umum. "Kami harap muncul pemikiran-pemikiran yang bisa kami monumenkan dalam bentuk buku. Buku ini bisa dibawa oleh alumni, peneliti dan institusi. Selanjutnya kita akan kampanyekan buku ini untuk dikembangkan juga menjadi kurikulum mengenai peace atau perdamaian dan resolusi konflik sehingga masyarakat luas dan dunia bisa mengambil manfaatnya," ungap Sri. (bagas)



## Generasi Muda / Alumni MGPS Harus Jadi Agen Perdamaian

Sebagaimana diketahui bersama Mahathir Global Peace School (MGPS) merupakan salah satu program yang berfokus pada pencapaian perdamaian dunia. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam MGPS tersebut selalu menitikberatkan pada resolusi konflik melalui jalan perdamaian, bukan peperangan. Program MGPS yang sudah berjalan empat kali dan akan dilanjutkan pada MGPS kelima yang akan dilaksanakan pada 25 November hingga 5 Desember 2016 ini, juga telah memiliki banyak alumni yang tersebar di beberapa negara.

Para alumni MGPS yang terdiri dari para generasi muda dan berjumlah sekitar 200 orang ini dituntut untuk bisa menjadi agen perdamaian, baik di negaranya sendiri maupun untuk mewujudkan perdamaian dunia. Apalagi para alumni MGPS tersebut juga telah memiliki jaringan khusus yang nantinya diharapkan bisa menciptakan jaringan baru di negaranya sendiri. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Indira Prabasari, Ph.D selaku Ketua Pelaksana MGPS ke-5, saat ditemui di Kantor Urusan Internasional UMY, Senin (14/11).

Menurut Indira, jaringan baru yang diharapkan bisa dibentuk oleh para alumni MGPS tersebut dapat menjadi sarana mereka untuk menyebarkan pesan perdamaian di negaranya masing-masing. Selain itu, jika alumni MGPS tersebut bisa membuat jaringan baru yang berfokus pada perdamaian, maka pesan perdamaian tersebut juga akan cepat sampai pada masyarakat luas. "Kami memiliki jaringan khusus yang anggotanya para alumni MGPS, mulai dari MGPS satu hingga empat, dan jumlahnya ada 200 anggota. Kedepannya kami harapkan para alumni ini bisa menjadi agen perdamaian untuk negaranya masing-masing dengan membentuk jaringan-jaringan baru. Karena sebuah pesan yang disampaikan kepada dan dari anak muda itu akan cepat tersampaikan," ujarnya.

Indira juga menjelaskan bahwa para alumni MGPS tersebut telah banyak menerima materi-materi tentang perdamaian pada kegiatan-kegiatan MGPS. Materi yang diberikan untuk

Potret Dokumentasi saat diberlangsungkannya MGPS yang ke-5

mengubah pola pikir mereka tentang perdamaian itu, diharapkan pula dapat mereka implementasikan dalam kehidupan nyata. "Untuk training dan pemberian materi yang bersifat akademis mengenai perdamaian mungkin akan berhenti sampai di MGPS kelima ini. Saat ini yang harus kita fokuskan selanjutnya adalah bagaimana membuat program yang implementatif bagi para alumni MGPS, agar mereka bisa menyebarkan pesan perdamaian ini di tempat-tempat yang berbeda," jelasnya.

Karena itulah, lanjut Indira, pada MGPS kelima ini pesan tentang perdamaian terutama terkait tema "Peace an Inter-Religious Dialogue in World Wide Education" bisa tersampaikan lebih luas lagi. "Dengan jumlah partisipan serta peserta yang lebih banyak dan beragam, seperti partisipan dari kalangan publik, perwakilan PGPF, partisipan undangan dari mitra UMY, serta peserta sit-in dari kalangan mahasiswa UMY, target kami di MGPS kelima ini bisa tersampaikan lebih luas lagi. Dan target kedua adalah bisa menghasilkan buku tentang perdamaian yang lebih komplit, dari mulai MGPS pertama hingga terakhir yang kelima ini, dari mulai tema tentang konflik yang disebabkan oleh perbatasan sampai konflik yang terjadi karena perbedaan agama. Buku itulah yang kemudian akan kami jadikan sebagai dasar-dasar lanjutan kerjasama antara UMY dan PGPF untuk membuat program berikutnya yang lebih implementatif," imbuhnya.

Adapun peserta MGPS kelima saat ini berasal dari Indonesia (13 orang), Pakistan (2 orang), Yaman (2 orang), Uzbekistan (2 orang), Malaysia (7 orang), Filipina (5 orang), Bangladesh (1 orang), Azerbaijan (1 orang), India (2 orang), Polandia (1 orang), United Kingdom (1 orang), Uganda (1 orang), Sudan (1 orang), dan Singapore (1 orang), serta 10 peserta sit-in dari kalangan mahasiswa S1 UMY. Sementara narasumber pada MGPS kelima ini adalah Dr. Sidi Omar (Universitat Jaume I, Spain), General Tan Sri Panglima Mohd Azumi Mohamed (Board of Trustee of Perdana Global Peace Foundation, Malaysia), Jend Purn Ryamizad Ryacudu, Prof. Greet A Van Klinken (Amsterdam University), Dr. Imtiyaz Yusuf (Director of the Center for Buddhist-Muslim Understanding in the Collage of Religious Studies at Mahidol University in Thailand), Dr. Elga Sarapung (Interfaith Dialogue in Indonesia), Letjen (Purn) Agus Widjojo (Governor of The National Resilience Institute (Lemhanas)), Stephane Reynier de Montlaux (Humanitarian Consultant), Dr. Chandra Muzaffar (President of the International Movement for a Just World (JUST)), Irfan Amalee, M.A (Co-Founder and Director of Peace Generation Indonesia), Prof. Dr. Alberto Gomes (Director of Dialogue, Emphatic Engagement and Peacebuilding), H.E. Ahmed Amer Ahmed Mouawad (Ambassador of Egypt for Indonesia), Assoc. Professor Dr. Mohd. Hisham Mohd. Kamal (Ahmad Ibrahim Kulliyah of Law, International Islamic University of Malaysia). (sakinah)



SELESAIKAN KONFLIK TANPA PERANG

PERDAMAIAN DICAPTAKAN DENGAN KEARIFAN LOKAL

PILIH PEMIMPIN CINTA DAMAI

PERDAMAIAN DENGAN RELASI ANTAR BANGSA

MAHATHIR  
GLOBAL  
PEACE  
SCHOOL  
#5

